

ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 DAN FATWA DSN

NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 PADA PT. BPRS

BERKAH DANA FADHLILLAH

AIR TIRIS

OLEH

FATIMAH

NIM. 10973005102



PROGRAM S1

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2013

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 DAN FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000

PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIRTIRIS

Oleh

FATIMAH

Penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 102 dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

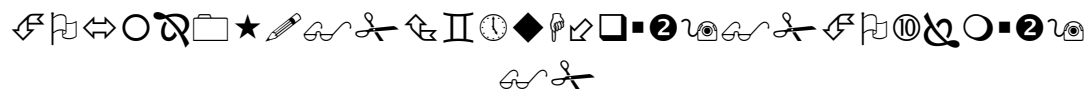
Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. Sedangkan dokumentasi yaitu dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan seperti neraca, laba rugi, profil perusahaan dan data lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah terdapat beberapa permasalahan antara lain : PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah masih memperbolehkan nasabah untuk membayar uang muka langsung kepada pihak Dealer, margin murabahah yang belum diakui PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, dan laporkan keuangan yang belum sesuai dengan PSAK No. 101.

Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa dalam penerapan PSAK No. 102 dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum didalam akuntansi syariah.

Kata kunci : Pembiayaan Murabahah, Perlakuan Uang Muka, Pengakuan Margin Murabahah, dan Penyajian Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan buat Rasulullah SAW yang telah membimbing umat manusia kepada jalan yang benar.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan kemampuan dan keterbatasan berfikir penulis sendiri. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Didalam penulisan skripsi ini juga penulis tak luput dari bantuan dan bimbingan dari semua pihak, oleh karena itu dengan menggunakan kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Hamdan AR dan Ibunda Irwana yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta berkat doa yang tulus dari keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan study dan penulisan skripsi ini. Serta saudara-saudara ku Khoirani Am. Keb SKM, Nurhayati,

Salman, Gunawan, Aisyah, Al-vian dan Adelina dan yang selalu sayang dan memberikan dukungan kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H.M. Nazir Karim, M.A sebagai Rektor UIN Suska Riau, yang memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dony Martias SE, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Yusrialis, SE, M.Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Nasrullah Djamil, SE, MM, Ak selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan motivasi pada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Rizaldi selaku direktur utama berserta karyawan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris, yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman selokal Akuntansi A: desmi, ega, yuni, widia, dewi dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih karena

kalian selalu memberikan dorongan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman dan Sahabat-sahabat ku : sulaiman, iis, hasna, mbak cicit, neng dian, heru, rades, ruslan, buk nurul, bunga cirit dan spesial buat hamdani siagian. Makasih banget buat kebersamaannya, canda tawanya, bantuannya dan dukungannya kepada penulis dalam kesehariannya.
11. Teman-teman KKN di Desa Siarang-arang : ayu, armi, mbak rina, yuli, ipam, rudi, saddam, buya, tanjung, mas dani, jerry, edo, ano . Semoga ilmu dan pengalaman yang kita peroleh ditempat KKN akan berguna bagi kita kelak.
12. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang diberikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan petunjuk-Nya kepada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa berikutnya dan pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

Fatimah

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Metodologi Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bank	13
B. Asal Usul dan Jenis-jenis	14
C. Kegiatan-kegiatan Bank	20
D. Produk dan Jasa Perbankan Syariah.....	22
E. Sistem Perbankan di Indonesia	29
F. Sistem Perbankan Syariah	31
G. Akad Bank Syariah	33

	H. Murabahah.....	37
	I. PSAK 102 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional	42
	J. Jurnal Transaksi Murabahah	51
BAB III	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
	A. Sejarah Berdiri Perusahaan	59
	B. Visi dan Misi	62
	C. Struktur Organisasi	64
	D. Produk-produk BPRS Berkah Dana Fadhlillah.....	69
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Akuntansi Murabahah	71
	B. Pemberian Uang Muka Kepada Pihak Dealer	73
	C. Pengakuan Margin Murabahah	81
	D. Penyajian Laporan Keuangan PT. Berkah Dana Fadhlillah.....	83
	E. Laporan Arus Kas.....	84
	F. Laporan Perubahan Ekuitas.....	87
	G. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	89
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	32
Tabel II.2	Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil	33
Tabel II.3	Jadwal Pembayaran Murabahah PT. HANIYA.....	56
Tabel III.1	Persentase Pemegang Saham PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah	60
Tabel III.2	Pendiri PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah	40
Gambar III.2	Struktur Organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah	64

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Secara filosofi, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi assetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai syariat islam.

Bank syariah di Indonesia bermula dari prakarsa Majelis Ulama Indonesia pada lokakarya bunga bank dan perbankan yang dilakukan di Bogor pada Tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya ini didukung oleh eksponen Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1991 ditandatangani Akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia.

Awalnya Bank Muamalat memiliki landasan hukum yang lemah, karena UU No. 07 Tahun 1992 belum menjelaskan tentang bank syariah, namun setelah terjadi revisi muncul UU No. 10 Tahun 1998 yang menjelaskan mengenai landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang telah dioperasikan dan dapat diimplementasikan oleh bank syariah, juga terdapat arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah, dan terakhir UU No. 21 Tahun 2008 yang membuat status bank syariah di Indonesia semakin kuat dan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan dapat mendorong pertumbuhan secara lebih cepat lagi.

Bank umum pertama yang menggunakan sistem syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 1992. Perkembangan bisnis bank syariah berlangsung lambat, sampai dengan lima tahun kedepan belum ada penambahan bank baru. Bank Muamalat masih menjadi satu-satunya bank syariah. Baru pada Tahun 1998 pasar bank syariah mulai diramaikan dengan hadirnya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) anak perusahaan Bank Mandiri, Bank BUMN terbesar di Indonesia. Selanjutnya menyusul kemunculan PT. Bank Mega Syariah pada tahun 2001. Memasuki tahun 2009 ada dua bank baru memasuki pasar perbankan syariah yaitu PT. Bank Bukopin Syariah dan PT. BRI Syariah.

Produk-produk yang ditawarkan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam penyaluran dana adalah mudharabah, musyarakah dan murabahah. Dalam penghimpunan dana antara lain deposito prinsip mudharabah, tabungan prinsip mudharabah dan giro dengan prinsip wadiah. Sedangkan pada pemberian jasa antara lain transfer, ATM dan payment poin, letter of kredit.

Dalam sistem ekonomi syariah, secara umum terdapat dua jenis akad dalam transaksi yang seringkali terjadi dan diakui secara syariah, yaitu akad *tabarru'* (kebaikan) dan akad *tijarah* (perdagangan). Akad *tabarru'* merupakan jenis akad dalam suatu transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi profit atau bisnis (*non-profit oriented*). Sedangkan akad *tijarah* merupakan jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi profit atau bisnis (*profit oriented*).

Di Indonesia, pedoman akuntansi perbankan syariah harus mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101-109 tentang akuntansi perbankan syariah. Pedoman ini berisi semua hal yang terkait dengan akuntansi perbankan syariah, diantaranya adalah panduan akuntansi produk-produk perbankan syariah. DSN adalah dewan yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk-produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan pembiayaan murabahah, Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan PSAK No. 102

tantang akuntansi murabahah dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan juga dapat bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam teori, murabahah dengan pesanan terbagi atas dua, yaitu yang bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Dalam praktik perbankan, umumnya barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat untuk dibeli oleh nasabah.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah merupakan bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah dalam menawarkan produknya kepada nasabah dalam menghimpun dana sedangkan untuk pembiayaan menggunakan sistem jual beli.

Berikut ini diperoleh informasi dari PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris sebagai berikut:

Pertama, Dalam pemberian pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, bank hanya memberikan maksimal 80% dari total pembelian barang. Pemberian pembiayaan murabahah seperti ini diperbolehkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah poin ketiga yaitu “bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya”. Dan pada Ketentuan Murabahah kepada Nasabah poin keempat disebutkan “dalam jual beli bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan”. Sementara itu kekurangan minimal 20% dari total pembelian barang, bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Sebagaimana tercantum dalam PSAK No. 102 pada paragraf 14 yang menyebutkan “penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati”. Kemudian pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Pada Ketentuan Umum Uang Muka point pertama yaitu “Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat”. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah pembiayaan murabahah pada barang yang telah diorder nasabah kepada pihak *Dealer* (pihak pengadaan barang) tidak sesuai dengan PAPSI 2003 tentang

urbun yang menyebutkan “dalam murabahah, *urbun* harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok”, namun pada prakteknya bank memperbolehkan nasabah untuk membayarkan uang muka kepada pihak *Dealer*, seharusnya uang muka dibayarkan kepada bank. Imam Syafi’I dalam kitab *Al Umm* menyatakan Penjual boleh meminta pembayaran *Hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi atau biasa disebut uang muka ketika ijab kabul. Uang muka inilah yang menjadi jaminan ganti rugi bila nasabah membatalkan transaksi murabahah. Uang muka yang diharamkan dalam jual beli disebabkan apabila tidak terjadi pembelian, uang muka hangus dan menjadi milik penjual, sehingga para *fuqaha* mengkategorikan sebagai makan harta secara batil dan *gharar*, sedangkan uang muka dalam pembiayaan murabahah sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.13/DSN-MUI/IX/2000 adalah sebagai upaya antisipasi resiko/kerugian yang akan ditanggung oleh LKS. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus berikut:

Pak Ali mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah untuk pembelian sebuah sepeda motor merk Mio CW yang akan diambil dari dealer Yamaha di Pasar Airtiris dengan harga Rp. 12.872.000,-. Setelah dilakukan negoisasi akhirnya bank menyetujui permohonan tersebut, dengan ketentuan bank mengambil keuntungan 20% dari harga perolehan, sehingga bank menjual sepeda motor tersebut kepada Bapak Ali dengan harga Rp. 15.446.400,- dan angsuran dilakukan 15 bulan yakni sebesar Rp. 1.029.760,-/bulan. Dalam pembelian sepeda motor tersebut bank hanya memberikan 80% dari total harga perolehan sepeda

motor kepada dealer, yakni sebesar Rp. 10.297.600,- dan Pak Ali membayarkan uang muka kepada pihak dealer sebesar Rp. 2.574.400,- atau 20% dari total perolehan barang. Disini seharusnya uang muka dibayarkan kepada pihak bank, bukan kepada dealer.

Kedua, terdapat pencatatan jurnal transaksi murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah yang belum sesuai dengan PSAK 102. Hal ini terjadi pada transaksi akad murabahah (yang ditangguhkan), dimana BPRS Berkah Dana Fadhlillah tidak mencatat margin murabahah pada saat penjualan murabahah dilakukan. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah hanya mencatat jurnal:

Piutang murabahah	11,619,299.00
-------------------	---------------

Persediaan asset murabahah	11,619,299.00
----------------------------	---------------

Hal ini dapat dilihat pada jurnal memorial pada tahun 2011, dimana bank hanya mencatat piutang murabahah dan persediaan asset murabahah saja. Menurut PSAK 102 paragraf 22, “piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan asset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati”. Selain itu, pada saat pembayaran angsuran dilakukan, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah juga tidak mengakui margin murabahah tangguhan. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah hanya mencatat jurnal:

Kas	14,502,833.00
-----	---------------

Piutang murabahah	14,502,833.00
-------------------	---------------

Menurut PSAK 102 pada poin penyajian seharusnya “margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang *murabahah*”. Pada laporan laba rugi margin *murabahah* muncul sebagai pendapatan operasional bank (Rizal Yaya, 2009 : 196). Hal tersebut dapat dilihat pada laporan laba rugi berikut:

LABA RUGI
PER DESEMBER 2011

POS-POS	Desember 2011	Desember 2010
Pendapatan operasional		
1. Margin	2,883,534.00	2,055,418.00
2. Bagi Hasil	38,427.00	33,962.00
3. Bonus		
4. Pendapatan Operasional Lainnya	154,920.00	129,179.00
Jumlah Pendapatan Operasional	3,076,881.00	2,218,559.00

Sumber : PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Ketiga, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap, karena hanya menyajikan Neraca, Laba rugi, Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS dan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Seharusnya menurut PSAK No. 102 yang merujuk pada PSAK No. 101 tentang Laporan Keuangan Syariah yang lengkap terdiri dari Tujuh komponen yaitu, Neraca, Laba rugi, Laporan Arus Kas, laporan Perubahan Ekuitas, laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 DAN FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIRTIRIS**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu “Apakah sistem pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah telah sesuai dengan PSAK No. 102 dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah telah sesuai dengan PSAK No. 102 dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000?

2. Manfaat Penelitian

- a. Kepada BPRS Berkah Fadhlillah Airtiris menjadi bahan masukan dan informasi mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih muamalah.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

D. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah yang berkedudukan di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50 Pasar Airtiris Kecamatan Kampar. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari Januari sampai April 2013.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak bank dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan judul penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi-informasi dan data-data yang relevan yang berkaitan dengan perbankan syariah khususnya pembiayaan murabahah, antara lain : Neraca, Laba Rugi, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Struktur Organisasi Perusahaan.

3. Teknik Pengambilan Data

- a. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan karyawan bagian operasional PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

- b. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen, brosur-brosur pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan meneliti dan membahas data yang ada kemudian menganalisa serta membandingkan kenyataan yang terdapat di perusahaan dengan teori yang telah dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membagi penulisannya dalam 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teoritis tentang pengertian bank, asal usul dan jenis-jenis bank, produk dan jasa perbankan syariah, sistem perbankan di Indonesia, sistem perbankan syariah, akad bank syariah, murabahah, PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI, dan jurnal dalam transaksi murabahah.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan gambaran umum yang membahas sejarah singkat berdirinya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, struktur organisasi dan aktifitas perusahaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini dijelaskan tentang pembahasan dan analisa dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi tulisan dan mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan berguna bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau dikenal sebagai banknote. (farlanwidiantara.blogspot.com)

Menurut Kasmir, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. (Kasmir, 2008 : 25)

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian bank di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah suatu badan yang bergerak dalam bidang keuangan yang memiliki fungsi sebagai tempat simpan dan pinjam serta mendapatkan keuntungan dari bunga untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank Syariah adalah bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. (Warkum Soemitra, 2004 : 5)

Sedangkan menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

B. Asal Usul dan Jenis-jenis Bank

1. Asal Usul Bank

Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke Negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun

Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa pertukaran uang. Kemudian selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat menitipan uang atau yang disebut kegiatan simpanan. (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/bank>)

Sedangkan sejarah awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamr Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil.

Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali ke Mesir pada tahun 1978 berdiri bank syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank for Investment and Development Bank.

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di Negara maju maupun Negara berkembang.

Perkembangan bank syariah di Indonesia bermula dari prakarsa Majelis Ulama Indonesia pada lokakarya bunga bank dan perbankan yang dilakukan di Bogor pada Tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya ini didukung oleh eksponen

Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1991 ditandatangani Akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran bank syariah di Indonesia khususnya cukup mengembirakan. Di samping BMI, saat ini juga telah hadir bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti, Bank BNI, Bank IFI, dan BPD Jabar.

Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, tetapi juga bank milik non-muslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan non-muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa.

2. Jenis-jenis bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank dan kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:(Kasmir, 2008 : 34)

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkan Undang-Undang RI Nomor 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bank milik pemerintah adalah bank yang pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
- b. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.
- c. Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan saham-saham bank dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
- d. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

3. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.
- b. Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan sebagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*)

C. Kegiatan-kegiatan Bank

Kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit.

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia menurut UU RI No 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut: ([http.id.wikipedia.org/wiki/Bank.htm](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank.htm))

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk Simpanan Giro (*Demand deposit*), Simpanan Tabungan (*Saving deposit*), dan Simpanan Deposito (*Time deposit*).
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Perdagangan.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) seperti Transfer (iriman uang), Inkaso(*Collection*), Kliring (*Clearing*), Jual Beli Surat Berharga, Bank Notes (*Valas*). Menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, telepon dan lain-lain.

2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan Tabungan dan Simpanan Deposito.
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Perdagangan.
- c. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat antara lain menerima Simpanan Giro, Mengikuti Kliring, Melakukan Kegiatan Valuta Asing, dan Melakukan Kegiatan Perasuransian.

3. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Pada umumnya bank asing dan campuran yang bergerak di Indonesia adalah bank umum dan tugasnya sama dengan bank umum lainnya, namun mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula.

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
- b. Kredit yang diberikan lebih diarahkan pada bidang-bidang tertentu, antara lain Perdagangan Internasional, Bidang Industri dan Produksi, Penanaman Modal Asing, dan Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.
- c. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia.

D. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*Financing*);

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1.1 Pembiayaan dengan Prinsip Jual-Beli

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya barang tersebut kepada pembeli (PSAK No. 102, Akuntansi *Murabahah*)

b. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman kemudian oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (PSAK No. 103, Akuntansi *Salam*)

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, entitas dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari resiko yang merugikan. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus

bertanggungjawab atas kelalaiannya.(PSAK No. 103, Akuntansi Salam : Paragraf 7-8)

c. Pembiayaan *Istishna*

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pemesan, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).*Istishna'* paralel adalah suatu bentuk akad *istishna'* antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dengan penjual (pembuat, *shani'*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani'*. (PSAK No. 104, Akuntansi *Istishna'* : Paragraf 5)

Berdasarkan akad *istishna'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*mashnu'*) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad.Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

1.2 Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *ijarah*.*Ijarah* adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.*Ijarah* adalah istilah dalam Fikih Islam dan bearti memberikan sesuatu

untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

a. *Wakalah*

Wakalah atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari penerima amanah.

b. *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.

c. *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.

d. *Rahn*

Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Tujuan akad *rahn* untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

1.3 Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah (PSAK No. 106, Tentang Akuntansi *Musyarakah*).

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pemilik dana. *Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi. *Mudharabah musyarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi (PSAK No. 105, Tentang Akuntansi Mudharabah).

Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

a. Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan titipan tersebut.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengamplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).

3. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain:

a. *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b. *Ijarah* (sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank mendapat imbalan dari jasa tersebut.

E. Sistem Perbankan di Indonesia

Sistem perbankan adalah sebuah tata cara, aturan-aturan dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan (bank-bank yang ada) menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Azas Perbankan Indonesia, pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992, yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian”.

Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menjalankan sebuah sistem perbankan yang baik, perlu adanya pilar-pilar yang menyangga agar sebuah sistem tersebut dapat berjalan. Dalam sistem perbankan Indonesia, pilar ini disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. ([http://blogspot.com/2012/03/ sistem perbankan indonesia](http://blogspot.com/2012/03/sistem-perbankan-indonesia))

Sistem perbankan yang berlaku di Indonesia ada dua macam yaitu:

1. *Unit Banking System*, suatu sistem yang menyebutkan bahwa berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup tertentu saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan sebatas di bank bersangkutan. Pada bank yang menganut sistem ini ciri-ciri organisasinya relatif kecil, rang lingkup operasi terbatas, delegasi wewenang masih terbatas, keputusan kredit lebih cepat, prosedur tidak berbelit-belit, contohnya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2. *Branch Banking System*, suatu sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas serta wilayah operasionalnya sangat luas/tidak terbatas pada wilayah tertentu saja, contohnya adalah Bank Umum

(Konvensional dan Syariah). (<http://kilasbank.blogspot.com/2010/12/sistem-perbankan>)

F. Sistem Perbankan Syariah

Sistem perbankan syariah adalah alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (nasabah dan bank), yang di dukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif, dan dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak. Perbankan yang kredibel dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.

Perbedaan utama antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional terletak pada:

1. Jenis produk yang lebih beragam dan skema keuangan yang lebih bervariasi
2. Pengolahan dana masyarakat yang transparan, sehingga lebih adil bagi nasabah dan bank.

Selain itu perbedaan lain antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada sistem operasionalnya. Dimana pada bank konvensional operasionalnya berdasarkan bunga, sedangkan bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Perbedaan lainnya antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Legalitas	1. Akad syariah	1. Akad konvensional
2. Struktur organisasi	2. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional	2. Tidak terdapat dewan sejenis
3. Bisnis dan usaha yang dibiayai	3. Melakukan investasi yang halal saja Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil	3. Investasi yang halal dan haram profit oriented Hubungan dengan nasabah bentuk hubungan kreditur-debitur melalui perangkat bunga
4. Lingkungan kerja	4. Islami	4. Non islami

Sumber : Amir Mahmud, 2010 : 12

Perbedaan sistem bunga pada bank konvensional dengan sistem bagi hasil pada bank syariah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.2
Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya.
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, dan seterusnya.
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua belah pihak, nasabah dan lembaga.
Dihitung dari mana	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya.
Titik perhatian proyek	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah / pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/ usaha jadi perhatian bersama : nasabah dan lembaga.
Berapa besarnya	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status Hukum	Berlawanan dengan Qur'an surat Luqman : 34	Melaksanakan Qur'an surat Luqman : 34

Sumber :Muhammad, 2005 : 18

G. Akad Bank syariah

Akad merupakan perjanjian tertulis yang berisikan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban

mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms* and *condition*-nya telah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti sudah disepakati dalam akad. (Adimarwan A Karim, 2010 : 65)

Adapun yang menjadi rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:

1. Rukun akad

Merupakan persyaratan penting yang harus ada dalam setiap akad. Tidak adanya salah satu unsur dalam rukun akad tersebut dapat mengakibatkan batalnya suatu akad. Dalam setiap akad syariah, rukun akad yang harus ada adalah: subjek akad (*'aqid*), objek yang diperjanjikan (*al-ma'qud*), dan sepakat yang dinyatakan (*shighatul aqad* atau lebih dikenal dengan *ijab qabul*).

2. Syarat akad

Merupakan syarat untuk dapat dilaksanakannya suatu akad. Seperti halnya syarat sah perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat, syarat pelaksanaan suatu akad meliputi:

- a. Syarat subjektif, atau pihak-pihak yang melaksanakan akad. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, subjek akad harus “cakap” untuk melakukan perbuatan hukum dan sepakat untuk membuat suatu akad.

- b. Syarat objektif, atau syarat atas objek yang diperjanjikan dalam akad. Dalam setiap akad, objek yang diperjanjikan harus amwal (halal). Selain itu, objek harus merupakan barang yang secara prinsip sudah dimiliki oleh pihak yang akan menyerahkan/menjualnya.

Pada dasarnya, akad-akad perbankan syariah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Akad Tijarah (*Tijary*)

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Konsep akad tijarah adalah adanya pertukaran, yakni pertukaran tersebut bisa dilakukan antara benda dan benda, benda dan uang, atau sebaliknya. Pada intinya, akad tijarah ini merupakan akad niaga. Oleh karena itu, dalam akad ini, para pihak boleh mengambil keuntungan dari transaksi niaga yang ada.

Yang termasuk dalam kategori pertukaran dalam akad tijarah adalah sebagai berikut: (Irma Devita, 2011 : 12)

- a. Akad jual beli
 1. *Murabahah* (jual beli atas barang yang sudah ada).
 2. *Salam* (jual beli barang pesanan terhadap hasil pertanian dan perkebunan)
 3. *Istishna'* (jual beli atas barang yang masih dibuat secara manufaktur dengan pembayaran di awal pada waktu pemesanan).

- b. Akad yang mengandung unsur percampuran kepemilikan
 - 1. *Mudharabah* (perjanjian bagi hasil), yang terdiri dari *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.
 - 2. *Syirkah* (percampuran kepemilikan atau kepemilikan bersama), yang terdiri dari *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah wujan*, dan *syirkah abdan*.
- c. Akad yang mengandung sewa
 - 1. *Ijarah murni*: pembayaran sewa atas penggunaan manfaat dari suatu barang.
 - 2. *Ijarah muntahiya bi al-tamlik* (IMBT) atau *ijarah wa iqtina*: perjanjian sewa dengan opsi untuk memiliki barang yang disewa pada akhir masa sewanya.

2. Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat baik tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta

kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru' tersebut. Akad tabarru' mengandung unsur:

- a. Murni titipan, yaitu akad wadi'ah pada tabungan dan deposito wadi'ah.
- b. Unsur kepercayaan:
 1. Akad *Wakalah*, yang mengandung unsur perwakilan (kuasa).
 2. Akad *Hawalah (Hiwalah)*, yang mengandung unsur pengambilalihan atau *factoring* atau *take over*.
 3. Akad *Kafalah*, yang mengandung unsur penjaminan.
 4. Akad *Rahn*, yang mengandung unsur titipan atas kebendaan secara kepercayaan.

H. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

a. Secara Bahasa

Murabahah berasal dari kata *ribhu*, menurut bahasa adalah keuntungan (Andri Soematri, 2010 : 79), keuntungan disini karena di dalam transaksi jual beli bank menyebutkan jumlah keuntungannya (*margin/ mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan

jangka waktu pembayaran. Berarti pada akad murabahah harus ada dasar suka sama suka, dalam arti tidak ada yang di rugikan dalam akad ini.

b. Secara Istilah

Banyak definisi yang diberikan para ulama terhadap pengertian murabahah tersebut. Tetapi semua definisi-definisi tersebut mempunyai arti atau makna yang sama.

Menurut PSAK 102 paragraf 5 *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. (Rizal Yaya, 2009 : 180)

Sedangkan menurut Sri Nurhayati dalam bukunya menjelaskan pengertian *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Sri Nurhayati, 2009 : 160)

Pada sistem murabahah, lembaga keuangan atau bank berperan sebagai penjual membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah keuntungan yang sudah disepakati di awal transaksi.

Karena dalam defenisinya disebutkan adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Ir. Adimarwan A. Karim memberi pengertian murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli. (Ir. Adimarwan A. Karim, 2006 : 113)

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Dari berbagai pengertian murabahah yang telah diungkapkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

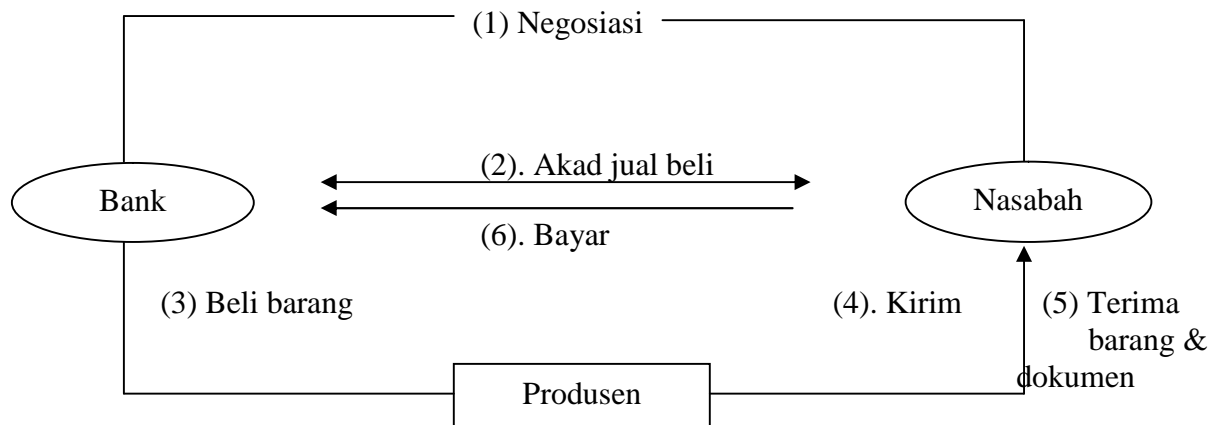
1. Dari sudut pandang fikih

Dari sudut pandang fikih, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan adanya keuntungan yang jelas atas dasar pembelian barang tersebut kepada pembeli, dan pembayaran atas barang tersebut dilakukan dikemudian hari baik secara tunai maupun secara angsuran.

2. Dari sudut pandang perbankan

Dari sudut perbankan, murabahah merupakan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dan nasabah, di mana menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada skema dibawah ini:

Gambar II.1 : Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah

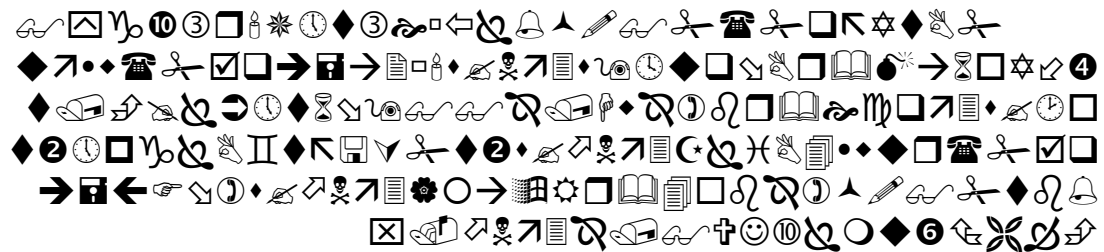


Sumber :Heri Sudarsono, 2004 : 63

Dari skema di atas dapat dijelaskan apabila bank dan nasabah ingin melakukan transaksi murabahah, maka yang pertama dilakukan adalah negosiasi, disini pihak bank menyebutkan persyaratan yang bersangkutan dengan transaksi murabahah harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dan syarat-syarat tersebut antara lain: pembeli, penjual, akad jual beli, harga barang, dan barang. Bank kemudian membeli barang atau memesan barang kepada produsen untuk kemudian dikirim kepada nasabah. Setelah nasabah menerima barang dan dokumen, maka nasabah harus

membayar barang tersebut sesuai dengan harga dan margin yang telah disepakati diawal akad. Setelah itu bank menerima pembayaran dari pembelian barang tersebut, maka dengan demikian terjadi transaksi murabahah.

Dalil yang menjadi landasan dari pembiayaan murabahah ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya : “**Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu**” (QS An-Nisa:29)

2. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun yang menjadi rukun transaksi murabahah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
2. Objek akad, yaitu, *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. (Ascarya, 2008 : 82)

Sedangkan syarat transaksi murabahah adalah sebagai berikut:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.

Jual beli secara *murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian. Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

I. PSAK 102 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah

Adapun karakteristik dan akuntansi murabahah dalam perbankan syariah menurut PSAK No. 102 paragraf 06-41 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi :

- a. diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang;
- b. diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
- c. komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang;

Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual/atau asset lainnya.

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:

- a. melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
- b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:

- a. melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
- b. mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, asset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Pengukuran asset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- a. jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - i. dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - ii. jika terjadi penurunan nilai asset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset:
- b. jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 - i. dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

- ii. jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian asset *murabahah* diakui sebagai:

- a. pengurangan biaya perolehan asset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
- b. kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
- c. tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
- d. pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- a. dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
- b. dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan asset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan *murabahah* diakui:

- a. pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
- b. selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:
 - i. keuntungan diakui saat penyerahan asset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dan piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 - ii. keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
 - iii. keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi

murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan pengalihan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.

Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp.800 dan keuntungan Rp.200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 (tiga) tahun; dimana jumlah angsuran pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*

Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
- diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

- jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;
- jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- b. jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- c. jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Akuntansi untuk Pembeli Akhir

Utang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayar).

Asset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai.

Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan. Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang *murabahah*.

Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurangan beban *murabahah* tangguhan.

Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

c. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) piutang *murabahah*.

Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) utang *murabahah*.

d. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. harga perolehan asset *murabahah*;
- b. janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*;
- b. jangka waktu *murabahah* tangguh.
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Sedangkan perlakuan *murabahah* berdasarkan PAFSI 2003 adalah sebagai berikut :

Proses pengadaan barang (aktiva) *murabahah* harus dilakukan oleh pihak bank. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan.

Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai karena kerusakan sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

Dalam *murabahah*, *urbun* harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran).

Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan antara lain:

1. Potongan *urbun* oleh pemasok
2. Biaya administrasi
3. Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan barang.

Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain:

1. Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murabahah*, dan
2. Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Berikut ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* (Zainuddin Ali, 2008 : 246-248)

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
3. Bank yang membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada nasabah.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah* :

1. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pemesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam *Murabahah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah* :

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah* :

Jika nasabah telah dinyatakan palit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

J. Jurnal Transaksi Murabahah

Penerapan akuntansi murabahah dapat dilihat dari contoh sebagai berikut:

- a. Pengakuan uang muka oleh bank

Dr. Kas

Kr. Uang muka

- b. Bank membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok

Dr. Persediaan aset murabahah

Kr. Kas/ Rekening nasabah

- c. Bank membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok

Dr. Persediaan aset murabahah

Kr. Utang pada pemasok

- d. Saat akad murabahah tidak jadi disepakati

Dr. Uang muka

Kr. Pendapatan Operasional

Kr. Kas

- e. Saat akad murabahah disepakati

Dr. Piutang murabahah

Kr. Persediaan aset murabahah

Kr. Margin murabahah yang ditangguhkan

- f. Pencatatan uang muka sebagai bagian pelunasan murabahah

Dr. Uang muka

Kr. Piutang murabahah

- g. Pencatatan biaya-biaya yang ditanggung nasabah

Dr. Kas/ Rekening nasabah

Kr. Pendapatan administrasi

Kr. Pendapatan materai

Kr. Rekening perusahaan asuransi

- h. Pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo

Dr. Kas

Kr. Piutang murabahah

Dr. Margin murabahah yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin murabahah

- i. Pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo dan dikenakan denda

Dr. Piutang murabahah jatuh tempo

Kr. Piutang murabahah

Dr. Margin murabahah yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin murabahah-akrual

Dr. Kas/rekening nasabah

Kr. Piutang murabahah jatuh tempo

Dr. Pendapatan margin murabahah-akrual

Kr. Pendapatan margin murabahah

Dr. Rekening nasabah

Kr. Rekening dana kebajikan

- i. Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa denda

Dr. Piutang murabahah jatuh tempo

Kr. Piutang murabahah

Dr. Margin murabahah yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin murabahah-akrual

Sebagai ilustrasi dalam pembiayaan murabahah dapat dicontohkan sebagai berikut: (Rizal Yaya, 2009 : 186)

Pada tanggal 5 Januari 2006, PT. HANIYA melakukan negoisasi dengan Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk membeli kendaraan sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut.

Harga barang	Rp. 100.000.000,-
Uang muka	Rp. 10.000.000,-
Pembiayaan oleh bank	Rp. 90.000.000,-
Margin	Rp. 18.000.000,-
Harga jual	Rp. 118.000.000,-
Jangka waktu	12 bulan
Biaya administrasi	1% dari pembiayaan oleh bank

Perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui

$$\begin{aligned}\text{Angsuran per bulan} &= (\text{Total Piutang} - \text{Uang muka})/\text{jumlah bulan pelunasan} \\ &= (\text{Rp. 118.000.000} - \text{Rp. 10.000.000})/12 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. 108.000.000}/12 \\ &= \text{Rp. 9.000.000}\end{aligned}$$

Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang

$$\begin{aligned}\text{Persentase keuntungan} &= (\text{Total Margin}/\text{Total Piutang bersih}) \times 100\% \\ &= (\text{Rp. 18.000.000} : \text{Rp. 108.000.000}) \times 100\% \\ &= 16,6666666\%\end{aligned}$$

Perhitungan margin perbulan

$$\begin{aligned}\text{Margin per bulan} &= \text{persentase keuntungan} \times \text{angsuran per bulan} \\ &= 16,6666666\% \times \text{Rp. 9.000.000} \\ &= \text{Rp. 1.500.000} \\ \text{Pokok per bulan} &= \text{angsuran per bulan} - \text{margin per bulan} \\ &= \text{Rp. 9000.000} - \text{Rp. 1.500.000} \\ &= \text{Rp. 7.500.000}\end{aligned}$$

Dengan demikian, untuk setiap pembayaran angsuran sebesar Rp. 9.000.000 per bulan, terkandung didalamnya margin sebesar Rp. 1.500.000 dan pokok sebesar Rp. 7.500.000.

Berdasarkan perhitungan angsuran, pokok dan margin per bulan diatas, bank selanjutnya menyiapkan skedul pembayaran murabahah untuk PT. HANIYA seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

TabelIII. 3

Jadwal Pembayaran Murabahah PT. HANIYA

No	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran per Bulan (Rp)	Pokok (Rp)	Margin (Rp)
1	10 Feb 2006	9.000.000	7.500.000	1.500.000
2	10 Mar 2006	9.000.000	7.500.000	1.500.000
3	10 Apr 2006	9.000.000	7.500.000	1.500.000
4	10 Mei 2006	9.000.000	7.500.000	1.500.000
5	10 Jun 2006	9.000.000	7.500.000	1.500.000
6	10 Jul 2006	9.000.000	7.500.000	1.500.000
7	10 Agt 2006	9.000.000	7.500.000	1.500.000
8	10 Sep 2006	9.000.000	7.500.000	1.500.000
9	10 Okt 2006	9.000.000	7.500.000	1.500.000
10	10 Nov 2006	9.000.000	7.500.000	1.500.000
11	10 Des 2006	9.000.000	7.500.000	1.500.000
12	10 Jan 2007	9.000.000	7.500.000	1.500.000
Total		108.000.000	90.000.000	18.000.000

Berdasarkan transaksi diatas, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Penerimaan uang muka oleh bank

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Rekening PT. Haniya	10.000.000	
Kr. Uang muka [*]		10.000.000

^{*}Uang muka disajikan dalam neraca pada bagian kewajiban

Pencatatan uang muka sebagai bagian pelunasan murabahah

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
-----------------	-------------------	--------------------

Dr. Uang muka	10.000.000	
Kr. Piutang murabahah		10.000.000

Pembelian barang secara tunai kepada pemasok

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Persediaan aset murabahah	100.000.000	
Kr. Kas/Rekening nasabah-pemasok		100.000.000

Pencatatan penjualan murabahah

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Piutang murabahah	118.000.000	
Kr. Persediaan aset murabahah		100.000.000
Kr. Margin murabahah yang ditangguhkan*		18.000.000

*Margin murabahah yang ditangguhkan disajikan di neraca sebagai pengurangan piutang murabahah. Cara penyajiannya sama dengan penyajian akumulasi depresiasi aset tetap. Margin murabahah yang ditangguhkan akan berkurang apabila telah jatuh tempo atau dibayar.

Pencatatan biaya-biaya yang ditanggung nasabah

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Kr)
Dr. Rekening nasabah-PT. Haniya	1.533.000	
Kr. Pendapatan administrasi		900.000
Kr. Persediaan materai		30.000
Kr. Rekening notaries		225.000
Kr. Rekening perusahaan asuransi		378.000

Pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal jatuh tempo

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Kas/Rekening PT. Haniya	9.000.000	
Kr. Piutang murabahah		9.000.000
Dr. Margin murabahah yang ditangguhkan*	1.500.000	
Kr. Pendapatan margin murabahah**		1.500.000

*Margin murabahah yang ditangguhkan dilaporkan di neraca sebagai pengurang piutang murabahah.

**Pendapatan margin murabahah dilaporkan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib.

Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Piutang murabahah jatuh tempo	9.000.000	
Kr. Piutang murabahah		9.000.000
Dr. Margin murabahah tangguhan	1.500.000	
Kr. Pendapatan margin murabahah-akrual		1.500.000
Dr. Kas/Rekening nasabah-PT Haniya	9.000.000	
Kr. Piutang murabahah jatuh tempo		9.000.000
Dr. Pendapatan margin murabahah-akrual [*]	1.500.000	
Kr. Pendapatan margin murabahah		1.500.000
Dr. Rekening nasabah-PT Haniya	150.000	
Kr. Rekening dana kebajikan [*]		150.000
[*] Dana kebajikan = 10% x total margin murabahah = 10% x 1.500.000 = 150.000		

Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Piutang murabahah jatuh tempo	9.000.000	
Kr. Piutang murabahah		9.000.000
Dr. Margin murabahah yang ditangguhkan	1.500.000	
Kr. Pendapatan margin murabahah-akrual		1.500.000
Dr. Kas/rekening nasabah-PT. Haniya	9.000.000	
Kr. Piutang murabahah jatuh tempo		9.000.000
Dr. Pendapatan margin murabahah-akrual	1.500.000	
Kr. Pendapatan margin murabahah		1.500.000

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Berdiri BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Berkah Dana fadhlillah atau disebut PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah yang disingkat dengan Bank Syariah Berkah ide awal pendiriannya merupakan hasil musyawarah dari para pendiri yang ingin memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Riau. Berawal dari keinginan para jama'ah wirid di Masjid Al-Khairat, yang beralamat di Jalan Mangga, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah berdiri pada tanggal 11 Juni 1994 dengan akte notaries H. Muhammad Afdal Gazali, SH dengan modal seluruhnya Rp. 107.000.000 dan 10.700 lembar saham. Akta tersebut kemudian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 13 November 1995 Nomor: C2-14546.01.01.TH.95.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah resmi beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor.KEP-197/KM-17/1996 tanggal 6 Juni 1996.

Anggaran dasar PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah terus mengalami perubahan sesuai perkembangan dan kemajuan sehingga telah beberapa kali diubah dan terakhir di ubah dengan Akta Notaris Nomor: 12, pada tanggal 23 Maret 2011 dengan Notaris Sri Hatika, SH. Akta perubahan tersebut juga telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2011, Nomor: AHU-26833.AH.01.02 Tahun 2011.

Adapun komposisi pemegang saham PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah sebagai berikut:

Tabel III.1

Persentase Pemegang Saham pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

No	Deskripsi	Persentase
1	Pemda Kampar	63,23%
2	Pengurus	3,47%
3	Masyarakat Umum	33,30%
Total		100%

Sumber : PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Adapun pendiri PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah sebanyak 42 orang sebagai berikut:

Tabel III. 2

Pendiri PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

No	Nama Pendiri	No	Nama Pendiri
1	Ramlan Zas, SH	22	Budi Satrio
2	dr. Musni Tambusai	23	Ir. Habash Semimbar, M.Sc
3	Drs. H. Agus Muhammad	24	Ahmad Deponegoro
4	H. Anas Ali	25	Nofiandri, SE
5	Drs. Syahrial Paman	26	Drs. Azwir Nasir, Ak
6	H. Awaluddin	27	Azizah, SH
7	H. Naidjar Miran	28	Drs. Bibit Parwito
8	H. Asnomel Sutan Kamaluddin	29	Dede Tresnahadi
9	H. Yasni	30	Mursyid Nento
10	H. Tengku Ahmad Surya Dharma	31	Endin Dewi Masri
11	Ir. Novizar Zen	32	Drs. H Firdaus Darwis
12	Ir. Darmansyah	33	Indra Utama Anthon
13	H. Firdaus Effendi	34	Herald Surya Hebban
14	H. Syahrul	35	Tiva Permata
15	H. Alizar Muluk	36	Rosiful Istinam
16	H. Jamalius	37	Drs. Hendri, M.Sc. Ak
17	Ir. H. Mahardi M.Sc	38	Budi Santoso, B.BA
18	Ir. H. Ahmiyul Rauf	39	Drs. H. Baharuddin Medany
19	Indrawardana	40	Didin Faridz Nugraha
20	Ir. H. Agus Sulaiman Djamil	41	H. Awaluddin Idris
21	Drs. Indra Masni, MA	42	H. Masri Datuk Kulabu

Sumber : PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Saat ini BPRS Berkah Dana Fadhlillah memiliki empat kantor pelayanan yakni:

1. Kantor pusat yang berlokasi di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 Airtiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar – Riau.
2. Kantor kas Bangkinang berlokasi di Komp. Islamic Centre Kabupaten Kampar Jl. Dl. Panjaitan Blok 4 Bangkinang – Riau.
3. Kantor kas Danau Bingkuang yang berlokasi di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 25, pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
4. Kantor kas Pekanbaru yang berlokasi di Jl. HR. HR. Subrantas Km 13,5, Kecamatan Tampan, Panam.

B. Visi dan Misi

Dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari, BPRS Berkah Dana Fadhlillah mengemban Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Bank Syariah unggulan yang sehat dan kuat, sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memperdayakan perekonomian rakyat kecil dan menengah.

b. Misi

1. Menggerakkan usaha-usaha masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha produktif.
2. Meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dengan kerjasama dalam manajemen usaha.

3. Memberikan tingkat keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dan umat dengan mengutamakan cara-cara halal & diridhoi Allah SWT.
4. Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarakat yang islami.

C. Struktur Organisasi

Untuk mempermudah kegiatan operasional perusahaan, maka dilakukan pendelegasian tugas dan tanggung jawab berdasarkan tiap bagian yang terdapat dalam perusahaan. Hal ini untuk mempermudah dalam garis koordinasi dan garis tanggung jawab.

Didalam badan usaha perlu adanya penempatan dan pembagian pekerjaan, tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang. Struktur organisasi tersebut harus memungkinkan adanya menempatkan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga koordinasi dan kerjasama diantara semua level dan manajemen dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam mencapai tujuan badan usaha.

Dari bentuk struktur organisasi perusahaan, maka dapat diketahui bahwa perusahaan menggunakan struktur organisasi lini dan staff. Karena dalam menjalankan tugasnya terbagi dalam beberapa divisi yang masing-masingnya terdapat staff. Adapun struktur organisasi pada BPRS Berkah Dana Fadhlillah dapat dilihat pada gambar berikut:

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, maka tugas dan wewenang masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Direktur Utama

1. Bertanggung jawab pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris secara keseluruhan dalam tingkat top management.
2. Membuat laporan setiap bulan kepada Bank Indonesia dan RUPS dan berusaha mempertahankan kredibilitas bank.

b. Dewan Pengawas Syariah

1. Melakukan pengawasan terhadap produk perbankan dalam rangka menghimpun dan menyebarkan dari dan untuk masyarakat agar berjalan sesuai dengan ketentuan islam.
2. Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana seluruh kegiatan perbankan syariah.

c. Legal dan Administrasi Pembiayaan

1. Mengatur, mengkoordinir dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan administrasi pembiayaan.
2. Melakukan peninjauan jaminan kelapangan bersama dan atau tanpa *account officer*, dalam rangka mengecek data-data jaminan pembiayaan nasabah terhadap kondisi yang sebenarnya.

3. Membuat laporan transaksi atau penilaian jaminan, baik dari sisi hukum maupun ekonomis agunan yang diajukan nasabah.
4. Membuat kelengkapan/ dokumen-dokumen yang berhubungan dengan realisasi pembiayaan nasabah (setelah disetujui pejabat yang berwenang, sesuai kapasitas masing-masing) seperti: perjanjian pembiayaan, *offering letter* (surat persetujuan pemberian pembiayaan), *half sheet* pembiayaan, slip: wakalah dan realisasi, biaya administrasi, biaya notaries, biaya asuransi, biaya matrai, tabungan wajib dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.
5. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen yang telah dibuat dan diserahkan oleh *account officer* sebelum disimpan ke tempat masing-masing. Serta memperhatikan catatan persetujuan *comitte credit meeting* untuk dipenuhi sebagaimana catatan tersebut.

d. Pimpinan Kantor Kas

1. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan dan aktivitas kantor pelayanan kas.
2. Mengupayakan pelayanan optimal kepada nasabah, calon nasabah dan atau masyarakat dikantor pelayanan kas.
3. Bersama direksi dan *account officer* membuat rencana pemasaran bank dikantor pelayanan kas.
4. Melakukan otorisasi pengeluaran uang sesuai dengan batas wewenangnya.

5. Memeriksa seluruh transaksi yang dilakukan dikantor pelayanan kas.

e. Account Officer

1. Mencari wilayah penyaluran dan penghimpunan dana baru dengan memperhatikan potensi dan peluang yang dapat diterima oleh masyarakat.
2. Mencari debitur dan deposan potensial.
3. Menjalin kerjasama mitra dengan KUD atau took-toko elektronik yang berpotensi sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara berkala maupun secara periodik.
4. Melempar dana seaman mungkin dengan melakukan analisis pembiayaan secara cermat dan hati-hati terhadap calon debitur.
5. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan dan realisasi pembiayaan.

f. Accounting (Pembukuan)

1. Membuat rekening baru yang disampaikan oleh bagian umum dan pembiayaan antara lain:
 - a. Pembukaan rekening tabungan dan deposito.
 - b. Rekening lain yang diperintahkan dan disetujui oleh direksi.
 - c. pembukaan rekening debitur baru.

2. Melakukan *input* transaksi berdasarkan nota yang dibuat sendiri atau oleh bagian lain setelah mendapat persetujuan dari satuan pengawas internal dan atau direksi.
3. Memeriksa dokumen-dokumen dan formulir-formulir yang disampaikan dan atau dibuat petugas atau unit kerja lain sebelum dilakukan *input* transaksi.
4. Melakukan kepada satuan pengawas internal, unit kerja lain dan atau direksi bila terdapat dokumen atau formulir yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan harian dan memeriksa kebenarannya, termasuk menghindari timbulnya selisih transaksi maupun selisih kas.

g. Personalia

1. Membuat perencanaan kebutuhan karyawan dan mengkoordinasikannya dengan direksi.
2. Melakukan pendataan dan pemrosesan seleksi penerimaan calon karyawan.
3. Menerima hasil evaluasi karyawan dari masing-masing pimpinan kerja/atasan langsung karyawan.
4. Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan karyawan secara umum.
5. Memberikan *reward* kepada karyawan yang berprestasi dan memiliki nilai lebih dalam kerjanya sebagai pemacu semangat kerja karyawan lainnya.

h. Satuan Pengawasan Intern

1. Melaksanakan control dan pengawasan melekat kepada pagawai dan aktivitas kerja diseluruh unit perusahaan sehingga akan tercapai efisiensi yang pada tahap berikutnya dapat memperkecil resiko dan atau kesalahan serta kegagalan kerja.
2. Memeriksa *voucher-voucher* pembukuan dengan daftar mutasi mengenai kebenaran *posting*, nomor rekening dan nominal yang disesuaikan dengan *print out*.
3. Mengelola *voucher-voucher* menurut rekening buku besar dan tanggal pembukuannya.
4. Memantau persediaan formulir berharga.
5. Memastikan agar dokumen rahasia dan alat-alat pengamanan tersimpan dan terpelihara sebagaimana mestinya.

D. Produk-produk BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris adalah sebagai berikut:

1. Produk Pendanaan (*Funding*)
 - a. Tabungan Berkah
 - b. Tabungan Tarbiyah (pendidikan)
 - c. Tabungan Arafah (haji)
 - d. Tabungan Qurban
 - e. Tabunganku

f. Deposito Berkah

2. Produk Pembiayaan (*Financing*)

a. Pembiayaan Murabahah (jual-beli)

b. Mudharabah (Bagi Hasil)

c. Al Qard (Pinjaman Dana)

d. Multi Jasa

e. Rahn Tasjily

3. Aktivitas Jasa Bank

a. Talangan Haji

b. Transfer On-line

c. Transfer Uang Cash

d. Pembayaran Listrik PLN

e. Pembelian Pulsa

f. Pembayaran Asuransi Takaful

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akuntansi Murabahah

Murabahah adalah akad jual barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus memberitahukan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. (PSAK No. 102 Paragraf 5)

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. (PSAK No. 102 Paragraf 6)

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. (PSAK No. 102 Paragraf 7)

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat

barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. (PSAK No. 102 Paragraf 8)

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan, jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli. (PSAK No. 102 Paragraf 10)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada point ketiga, Jaminan dalam *Murabahah* menyebutkan: (Zainuddin Ali, 2008:247)

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau asset lainnya. (PSAK No. 102 Paragraf 13)

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah menerima fasilitas. (UU RI No. 21 Tahun 2008)

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikannya, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. (PSAK No. 102 Paragraf 15)

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:

- a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
- b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. (PSAK No. 102 Paragraf 16)

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:

- a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
- b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran. (PSAK No. 102 Paragraf 17)

B. Pemberian Uang Muka Kepada Pihak Dealer

Sesuai dengan PSAK No. 102 Paragraf 14 pada akad pembiayaan *murabahah*, penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Sedangkan Fatwa DSN-MUI pada ketentuan *murabahah* point 4 dan 6 menyatakan dalam jual beli bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dan jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.

Menurut fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 pada ketentuan umum uang muka dalam *murabahah* menyatakan:

1. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS uang muka tersebut.
4. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.

5. Jika uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kepada nasabah.

Namun, Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000)

Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* tidak memerlukan uang muka, namun dalam prakteknya bank syariah biasanya meminta uang muka kepada nasabah minimal 20% dari harga barang dan bank hanya memberikan maksimal 80% dari pembelian tersebut. Pemberian pembiayaan *murabahah* seperti ini diperbolehkan sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum *murabahah* pada poin ke 3 yaitu, bank

membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Praktek pembiayaan *murabahah* seperti itu juga diterapkan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah bank hanya memberikan pembiayaan maksimal 80% dari total pembelian barang. Sementara, kekurangan 20% dari total pembelian barang bank mensyaratkan uang muka kepada nasabah sebelum akad disepakati sebagai bukti komitmen pada akad tersebut.

Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah pembiayaan *murabahah* pada barang yang sebelumnya diorder nasabah dari *Dealer* (pihak pengadaan barang) kurang sesuai dengan PAPSI 2003 yang menyebutkan dalam *murabahah*, *urbun* harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. Namun, pada prakteknya bank memperbolehkan nasabah untuk membayar uang muka langsung kepada dealer, seharusnya uang muka dibayarkan kepada bank. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis pada tanggal 22 Februari 2013 kepada karyawan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, dimana penulis mengajukan beberapa pertanyaan dan salah satunya:

Pertanyaan : Bagaimana pemberlakuan uang muka pada pembiayaan murabahah? Apakah PT. BPRS Berkah memperbolehkan nasabah membayarkan uang muka langsung kepada dialer/pemasok?

Jawaban : Pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah selalu memakai uang muka sebagai bukti komitmen nasabah pada transaksi murabahah, seharusnya uang muka dibayarkan kepada bank, tapi karena nasabah mempunyai kenalan di dialer tersebut, bank memperbolehkan nasabah ke dealer langsung, dan angsurannya dibayarkan kepada bank, dengan catatan nasabah memberikan kwitansi pembelian sepeda motor kepada bank.

Sebagai ilustrasi dari kasus diatas perhatikan pada contoh berikut ini:

Pak Ali mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah untuk pembelian sebuah sepeda motor merk Mio CW yang akan diambil dari *Dealer* Yamaha di Pasar Airtiris dengan harga Rp. 12.872.000,-. Setelah dilakukan negoisasi akhirnya bank menyetujui permohonan tersebut, dengan ketentuan bank mengambil keuntungan 20% dari harga perolehan, sehingga bank menjual sepeda motor tersebut kepada Bapak Ali dengan harga Rp. 15.446.400,- dan angsuran dilakukan 15 bulan yakni sebesar Rp. 1.029.760,-/bulan. Dalam pembelian sepeda motor tersebut bank hanya memberikan 80% dari total harga perolehan sepeda motor kepada *Dealer*, yakni sebesar Rp. 10.297.600,- dan Pak Ali membayarkan uang muka kepada pihak *Dealer* sebesar Rp. 2.574.400,- atau 20% dari total perolehan barang. Disini seharusnya uang muka dibayarkan kepada pihak bank, bukan kepada *Dealer*.

ANALISIS BANK

Berikut ini adalah analisis bank dalam memberikan pembiayaan pada pak Ali pada pembiayaan *murabahah* diatas dengan keuntungan yang diambil bank sebesar 20% dari harga perolehan sepeda motor Mio CW tersebut:

Harga sepeda motor Mio CW	: Rp. 12.872.000
Margin (keuntungan)	: Rp. <u>2.574.400 +</u>
Harga jual bank kepada nasabah	: Rp. 15.446.400
Uang muka yang dibayarkan nasabah kepada dealer	: Rp. <u>(2.574.400)</u>
Sisa hutang yang harus diangsur nasabah kepada bank	: Rp. 12.872.000
Jangka waktu	: 15 Bulan
Jumlah angsuran perbulan	: Rp. 858.134

Perlakuan akuntansi pada transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat penerimaan uang muka dari nasabah

Karena uang muka langsung diberikan pak Ali ke *Dealer*, maka pihak bank tidak melakukan pencatatan jurnal atas pemberian uang muka tersebut.

- b. Pada saat pembelian asset murabahah dari *Dealer*, maka (Harga Perolehan - uang muka yang dibayarkan pak Ali ke *Dealer* : Rp. 12.872.000 - Rp. 2.574.400 = Rp. 10.297.600)

Dr. Persediaan asset murabahah *Rp. 10.297.600*

Kr. Kas *Rp. 10.297.600*

- c. Pada saat penjualan asset murabahah kepada pak Ali, maka bank mencatat jurnal sebagai berikut:

Dr. Piutang murabahah *Rp. 12.872.000*

Kr. Persediaan asset murabahah *Rp. 2.574.400*

Kr. Margin *Rp. 10.297.600*

- d. Pada saat penerimaan angsuran per bulan dari nasabah sebesar Rp. 858.134 (Pokok + Margin : Rp. 686.507 + Rp. 171.627 = Rp. 858.133)

Dr. Kas *Rp. 858.134*

Kr. Piutang murabahah *Rp. 858.134*

Jika uang muka dibayarkan langsung kepada bank, maka perlakuan jurnal yang seharusnya dibuat oleh bank dari transaksi murabahah sebagai pihak penjual adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat bank mendebit langsung rekening Pak Ali.

Dr. Rekening nasabah-Pak Ali *Rp. 2.574.400*

Kr. Piutang Murabahah *Rp. 2.574.400*

- b. Pada saat pembelian asset murabahah dari *Dealer*, bank melakukan pencatatan sebesar biaya perolehan sepeda motor (Rp. 12.872.000).

<i>Dr. Persediaan asset murabahah</i>	<i>Rp. 12.872.000</i>
<i>Kr. Kas</i>	<i>Rp. 12.872.000</i>

- c. Saat penjualan asset murabahah pada pak Ali, maka bank melakukan pencatatan piutang sebesar (Harga Perolehan + Margin : Rp. 12.872.000 + Rp. 2.574.400 = Rp. 15.446.400)

<i>Dr. Piutang murabahah</i>	<i>Rp. 15.446.400</i>
<i>Kr. Margin murabahah yang ditangguhkan</i>	<i>Rp. 2.574.400</i>
<i>Kr. Persediaan asset murabahah</i>	<i>Rp. 12.872.000</i>

- d. Karena transaksi murabahah disepakati, maka bank langsung mendebit rekening Pak Ali menjadi bagian dari pelunasan piutang.

<i>Dr. Rekening nasabah-Pak Ali</i>	<i>Rp. 2.574.400</i>
<i>Kr. Piutang murabahah</i>	<i>Rp. 2.574.400</i>

- e. Pada saat penerimaan angsuran per bulan dari Pak Ali sebesar Rp.858.134 (Pokok + Margin : Rp. 686.507 + Rp. 171.627 = Rp. 858.133)

<i>Dr. Kas</i>	<i>Rp. 858.134</i>
<i>Kr. Piutang murabahah</i>	<i>Rp. 858.134</i>
<i>Dr. Margin murabahah yang ditangguhkan</i>	<i>Rp. 171.627</i>

Kr. Pendapatan margin murabahah

Rp. 171.627

Jika uang muka dibayarkan langsung kepada dealer, maka tidak berpengaruh pada laporan keuangan. Karena, bank langsung mendebit ke rekening nasabah.

C. Pengakuan Margin Murabahah

Pada saat akad murabahah, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan piutang. (PSAK No. 102 Paragraf 22)

Menurut PAFSI 2003 pada bagian penyajian menyatakan: (1) piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. (2) margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

Pada saat akad murabahah disepakati, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah tidak mencatat margin murabahah. Menurut PSAK No. 102 Paragraf 38 menyebutkan bahwa margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Jadi, jurnal yang harus dibuat oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah sebagai berikut:

<i>Piutang murabahah</i>	<i>11,619,299.00</i>
<i>Persediaan asset murabahah</i>	<i>11,458,555.00</i>
<i>Margin murabahah yang ditangguhkan</i>	<i>160,744.00</i>

Kemudian pada saat pembayaran angsuran dilakukan PT. BPRS Berkah dana Fadhlillah juga tidak mengakui margin murabahah dan pendapatan margin murabahah. Seharusnya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah mencatat jurnal sebagai berikut:

<i>Kas</i>	<i>11,619,299.00</i>
<i>Piutang murabahah</i>	<i>11,619,299.00</i>
<i>Margin murabahah yang ditangguhkan</i>	<i>3,076,881.00</i>
<i>Pendapatan margin murabahah</i>	<i>3,076,881.00</i>

Margin murabahah yang ditangguhkan dilaporkan di neraca sebagai pengurang piutang murabahah. Dalam laporan keuangan syariah, semua piutang murabahah telah dikurangi terlebih dahulu dengan margin murabahah yang ditangguhkan. (Rizal Yaya, 2009 : 196)

Pendapatan margin murabahah dilaporkan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan pengelola dana sebagai mudharib. Jika pendapatan margin murabahah telah berwujud kas, maka jumlah tersebut dapat diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah penghimpun dana yang menggunakan akad mudharabah. (Rizal Yaya, 2009 : 196)

D. Penyajian Laporan Keuangan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah meliputi: (a) asset, (b) kewajiban, (c) dana syirkah temporer, (d) ekuitas, (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, (f) arus kas, (g) dana zakat, dan (h) dana kebajikan. (PSAK No. 101 Paragraf 8)

Berdasarkan PSAK No. 102 yang mana pengungkapan yang diperlukan tentang penyajian laporan keuangan syariah harus sesuai dengan PSAK No. 101. (PSAK No. 102 Paragraf 40)

PSAK No. 101 mengatur tentang komponen-komponen laporan keuangan entitas syariah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian antara lain sebagai berikut: (PSAK N0. 101 Paragraf 11)

- a. Neraca;
- b. Laporan Laba Rugi;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah belum sesuai dengan PSAK No. 101, karena PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah hanya membuat sebagian saja dari laporan tersebut, yaitu:

- a. Neraca
- b. Laba Rugi
- c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- d. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan

E. Laporan Arus Kas

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah belum memuat dan menyajikan laporan arus kas yang semestinya dilaporkan pada akhir periode akuntansi. Laporan arus kas merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang memuat informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang menghasilkan kas dan penggunaan kas sebuah perusahaan. Seharusnya laporan Arus kas yang dibuat oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah sebagai berikut:

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah	
Laporan Arus Kas	
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2011	
Arus Kas dari Aktivitas Operasional	
Penerimaan bagi hasil dan <i>fee (ujrah)</i>	xxx
Pembayaran bagi hasil	xxx
Pembayaran kas pada karyawan dan pemasok	<u>xxx</u>
Laba operasi sebelum perubahan dalam aktiva operasi	xxx
<i>(kenaikan)/ penurunan dalam aktiva operasi:</i>	
Dana jangka pendek	
Deposito untuk tujuan pengendalian moneter	xxx
Dana uang muka (urbun) pada langganan	xxx
Surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan	xxx
<i>(kenaikan)/ penurunan dalam hutang operasi:</i>	
Deposito dari pelanggan	xxx
Kas bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	xxx
Pajak penghasilan	<u>xxx</u>

Arus kas bersih dari aktivitas operasi setelah pajak penghasilan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pelepasan anak perusahaan	xxx
Dividen yang diterima	xxx
Bagi hasil yang diterima	xxx
Hasil penjualan surat berharga yang tidak diperjualbelikan	xxx
Pembelian surat berharga yang tidak diperjualbelikan	xxx
Pembelian tanah, bangunan, dan peralatan	<u>xxx</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Penerbitan modal pinjaman	xxx
Penerbitan kembali pinjaman jangka panjang	xxx
Pembayaran dividen	<u>xxx</u>
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	xxx
Pengaruh perubahan kurs valuta kas dan setara kas	<u>xxx</u>
Kenaikan bersih kas dan setara kas	xxx
Kas dan setara kas pada awal periode	<u>xxx</u>
Kas dan setara kas pada akhir periode	xxx

Sumber :<http://www.google.com>

Contoh penyajian Laporan Arus Kas yang seharusnya dibuat oleh PT. BPRS

Berkah Dana Fadhlillah adalah sebagai berikut:

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah
Laporan Arus Kas

Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2011

Arus Kas dari Aktivitas Operasional

Laba operasi	Rp. 377.537,00
Penerimaan bagi hasil dan <i>fee (ujrah)</i>	Rp. 38.427,00
Pembayaran bagi hasil	(Rp. 722.452,00)
Pembayaran kas pada karyawan dan pemasok	(Rp.372.117,00)
Deposito dari pelanggan	Rp. 1.060.550,00
Kas bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	Rp. 375.666,00
Pajak penghasilan	(Rp.52.992,00)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi setelah pajak penghasilan	Rp.740.619 ,00

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pembelian aktiva tetap dan aktiva lain-lain	Rp.876.134,00
---	---------------

Arus Kas dari Transaksi Pendanaan

Kewajiban segera lainnya	(Rp. 39.509,00)
Tabungan wadiah	Rp.400.856,00
Tabungan mudharabah	Rp.10.280.887,00
Deposito mudharabah	Rp.1.060.550,00
Kewajiban lainnya	<u>Rp. 647.417,00</u>
Arus kas bersih dari transaksi pendanaan	Rp. 12.350.201,00

Sumber : Data Hasil Olahan 2013

F. Laporan Perubahan Ekuitas

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah belum memuat dan menyajikan laporan perubahan ekuitas yang semestinya dilaporkan pada akhir periode akuntansi. Hal ini

sesuai dengan pernyataan PSAK No. 101 paragraf 67 yang menyatakan entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang meliputi: Laba dan rugi bersih periode yang bersangkutan, setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian berserta jumlahnya, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik dan saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Seharusnya Laporan Perubahan Ekuitas yang dibuat oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah sebagai berikut:

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah
Laporan Perubahan Ekuitas
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2011

Laba bersih (satu tahun)	xxx
Pembentukan cadangan	
Cadangan Umum	xxx
Cadangan Tujuan	xxx
Modal Disetor	
Modal Dasar	xxx
Modal yang Belum Disetor	xxx
Tambahan modal disetor	
Modal Sumbangan	<u>xxx</u>
Total Ekuitas Per 31 Des 2011	xxx

Sumber : <http://www.goegle.com>

Contoh penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang seharusnya dibuat oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah sebagai berikut:

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2011	
Laba bersih (satu tahun)	Rp. 347.895,00
Pembentukan cadangan	
Cadangan umum	Rp. 121.900,00
Modal disetor	Rp. 1.132.490,00
Tambahan modal disetor	<u>Rp. 1.087.333,00</u>
Total Ekuitas Per 31 Des 2011	Rp. 2.664.397,00
<u>Sumber : Data Hasil Olahan</u>	

G. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah belum menyajikan catatan atas laporan keuangan. Menurut PSAK No. 101 Paragraf 80 menyatakan catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling mendominasi pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.
2. Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah dalam pembiayaan murabahah pada barang yang sebelumnya diorder nasabah dari *Dealer* (pihak pengadaan barang) kurang sesuai dengan aturan syariah, karena bank memperbolehkan nasabah untuk membayarkan uang muka kepada *Dealer*.

3. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah belum mencatat margin murabahah saat akad murabahah disepakati. Selain itu, pada saat pembayaran angsuran dilakukan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah juga tidak mengakui margin murabahah.
4. Penyajian Laporan Keuangan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah belum sesuai dengan PSAK NO. 101, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang belum disajikan secara lengkap pada akhir periode, yakni pihak bank hanya menyajikan Neraca, Laba Rugi, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan saja. Sedangkan laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca, Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Saran

1. Untuk penulis selanjutnya disarankan memperluas ruang lingkup pembahasan dari produk murabahah, yaitu melihat dari beberapa contoh-contoh kasus dalam pembiayaan murabahah bermasalah, menambahkan data dengan menggunakan responden-responden terkait serta menambah lokasi penelitian, tidak hanya di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah saja.
2. Pembiayaan murabahah pada barang yang sebelumnya telah diorder nasabah dari *Dealer* (pihak pengadaan barang), dalam pembayaran uang muka seharusnya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah tidak memperbolehkan nasabah membayar uang

muka kepada *Dealer* (pihak pengadaan barang), seharusnya uang muka dibayarkan kepada pihak bank. Karena disini yang melakukan transaksi pembiayaan adalah antara bank dan nasabah, bukan *Dealer* dengan nasabah. Sedangkan peran pihak *Dealer* disini adalah sebagai penyedia barang, dan keterkaitan pihak Dealer ini adalah dengan pihak bank.

3. Saat akad murabahah disepakati seharusnya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah mencatat margin murabahah. Kemudian, pada saat angsuran dilakukan seharusnya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah juga mengakui margin murabahah disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.
4. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah seharusnya menyajikan laporan keuangan secara lengkap sesuai PSAK No.101. dimana laporan keuangan yang lengkap akan mencerminkan kewajaran dalam penilaian seluruh aktifitas yang terjadi dalam perusahaan.
5. Belum menerapkan denda pada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajiban. Seharusnya bank mengenakan denda pada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad maka denda yang diterima bank diakui sebagai bagian dana kebajikan.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 29

A Karim, Adimarwan, 2006, *Bank Islam :Analisis Fiqih dan Keuangan*,Edisi Ketiga, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada

————— 2010, *Bank Islam :Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Keempat, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Islam*,Jakarta; Sinar Grafika

Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*,Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*,Jakarta; Salemba Empat

Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta; T. Raja Grafindo Persada

Mahmud, Amir, 2010, *Teori Bank Syariah dan Study Empiris di Indonesia*,Jakarta; Erlangga

Muhammad, 2005, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*,Yogyakarta; BPFE-YOKYAKARTA

Nurhayati, Sri, 2009, *Akuntansi Syariah di Indonesia*,Jakarta; Salemba Empat

Purnamasari, Irma Devita, 2011, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak MemahamiAkad Syariah*, Bandung; PT. Mizan Pustaka

Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*,Yogyakarta; EKONISIA

Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,Edisi Cetakan ke 2, Jakarta; Prenada Media Group

————— 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,Jakarta; Kencana

Sumitro, Warkum, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*,Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada

Suhendi, Hendi, 2008, *Fikih Muamalah*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Yaya, Rizal dkk, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta; Salemba Empat

<http://syariahberkah.blogspot.com>

<http://blogspot.com/2012/03> sistem perbankan indonesia

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/bank>

<http://kilasbank.blogspot.com/2010/12/sistem-perbankan>